



Article Informations
Corresponding Email:
adnanalf55@gmail.com

Received: 06/02/2025; Accepted:
16/02/2025; Published: 30/06/2025

PERAN INTERPOL INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA DI KAMBOJA

Muhammad Adnan Alfarizi¹⁾, Iing Nurdin²⁾, Jusmalia Oktaviani³⁾

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Interpol Indonesia dalam menangani kasus penjualan organ tubuh manusia di Kamboja (2021-2023), sebuah kejahatan transnasional yang meningkat akibat tingginya permintaan organ tubuh manusia. Kasus di Kamboja menjadi perhatian utama karena melibatkan korban dari Indonesia. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, wawancara, dan analisis dokumen. Fokus penelitian meliputi peran Interpol dalam koordinasi lintas negara, pencegahan, dan penindakan perdagangan organ. Hasil penelitian bertujuan menganalisis peran Interpol Indonesia, serta menilai kerjasama antara Interpol dan lembaga penegak hukum di Kamboja dan Indonesia. Kasus ini dipicu oleh faktor kemiskinan, pendidikan rendah, dan penegakan hukum yang lemah, dengan korban direkrut melalui penipuan daring dan dieksploitasi, bahkan menjadi target perdagangan organ tubuh manusia. Penanganan kasus ini terkendala perbedaan legal standing, memerlukan upaya diplomasi untuk mendorong regulasi terkait perdagangan organ di Kamboja.

Kata Kunci: Interpol, Perdagangan Organ, Kejahatan Transnasional, Kamboja, dan Kerja Sama Internasional.

Abstract

This research examines the role of Interpol Indonesia in handling the case of human organ sales in Cambodia (2021-2023), a transnational crime that has increased due to the high demand for human organs. The Cambodian case became a major concern because it involved Indonesian victims. The research method uses descriptive qualitative through literature study, interviews, and document analysis. The focus of the research includes the role of Interpol in cross-border coordination, prevention, and prosecution of organ trafficking. The results of the study aimed to analyze the role of Interpol Indonesia, as well as assess the cooperation between Interpol and law enforcement agencies in Cambodia and Indonesia. This case was triggered by poverty, low education, and weak law enforcement, with victims recruited through online fraud and exploited, even targeted for human organ trafficking. The handling of this case is

constrained by differences in legal standing, requiring diplomatic efforts to encourage regulations related to organ trafficking in Cambodia.

Keywords: *Interpol, Organ Trafficking, Transnational Crime, Cambodia, and International Cooperation.*

PENDAHULUAN

Berbagai jenis kejahatan sering kali muncul akibat lemahnya interaksi sosial dalam masyarakat. Saat ini, pelaku kejahatan tidak lagi memperhatikan situasi, kondisi, lokasi, atau waktu saat melakukan aksinya. Kejahatan lintas negara bisa dilakukan secara langsung atau melalui kemajuan teknologi. Beberapa jenis kejahatan lintas negara yang diakui oleh hukum internasional meliputi perdagangan narkoba, pencucian uang, korupsi, kejahatan siber, perdagangan dan penyelundupan manusia, serta berbagai bentuk kejahatan lainnya.¹

Penjualan organ manusia di Kamboja merupakan masalah serius yang melibatkan sindikat internasional. Interpol, sebagai organisasi kepolisian internasional, memiliki peran penting dalam menangani kasus ini. Interpol membantu dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang terlibat dalam perdagangan organ manusia lintas negara. Dengan jaringan globalnya, Interpol dapat mengkoordinasikan upaya penegakan hukum antara negara-negara yang terlibat, termasuk Kamboja dan negara asal pelaku atau korban. Selain itu, Interpol juga menyediakan dukungan teknis dan pelatihan kepada kepolisian setempat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus perdagangan organ manusia. Interpol juga mengeluarkan 'red notice' atau peringatan internasional untuk menangkap buronan yang terlibat dalam kasus ini.²

Proses transplantasi organ manusia kini berkembang pesat, tidak hanya terbatas pada transplantasi jantung, tetapi juga mencakup organ lain seperti ginjal, hati, serta berbagai jaringan tubuh, termasuk ligamen dan saraf. Biasanya, organ dan jaringan untuk transplantasi diperoleh dari anggota

¹ Rosamalinda, Anggun et al. "Tinjauan Kriminologi Keimigrasian Terhadap Perdagangan Organ Lintas Negara Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Volume 8 (2021): n. pag.* Diakses 22 November 2024. Web. <<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>>.

² Selpi. "Ungkap Jaringan Sindikat Internasional TPPO Penjualan Ginjal, Bekasi Jadi Markas, Kamboja Jadi Tujuan". 2023. Print. Diakses 5 Januari 2025

keluarga dekat, karena kesamaan kondisi kesehatan, kecocokan golongan darah, serta kemiripan karakteristik antibodi, disertai pertimbangan etika dan kemanusiaan. Seiring dengan kemajuan zaman, kejahatan lintas negara seperti perdagangan organ tubuh manusia semakin meluas. Aktivitas ilegal ini melibatkan organ-organ penting seperti jantung, ginjal, hati, dan paru-paru, yang diperdagangkan untuk keperluan transplantasi.³

Perdagangan orang adalah kejahatan permasalahan global yang sangat rumit dan menyebabkan kerugian besar bagi banyak orang. Permasalahan perdagangan manusia di Kamboja mulai muncul pada tahun 1990, namun kasus perdagangan organ tubuh manusia semakin nyata seiring waktu. Perdagangan organ manusia sering kali disamarkan sebagai “transplantasi ginjal” ilegal, di mana korban ditipu untuk menjual ginjal mereka kepada sindikat internasional yang kemudian diekspor ke negara lain, termasuk Kamboja. Antara tahun 2021 hingga 2023, kasus perdagangan manusia terkait penjualan organ, terutama ginjal, di Kamboja mendapat banyak perhatian. Sindikat tersebut merekrut calon pendonor dari Indonesia dan membawa mereka ke Kamboja untuk menjalani operasi pengangkatan ginjal. Penyelidikan Interpol mengungkap praktik ini, dan tercatat sindikat tersebut telah beroperasi sejak 2019, melibatkan 122 korban.⁴

Perdagangan organ tubuh manusia di Kamboja merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan pendekatan nyata serta kerja sama internasional. Upaya dari Interpol dan lembaga internasional lainnya sangat diperlukan untuk memberantas praktik keji ini. Peningkatan kesadaran publik juga penting untuk mengatasi tantangan ini dengan lebih efektif. Selama beberapa tahun terakhir, Interpol telah mengamati peningkatan yang signifikan dalam perdagangan manusia berskala besar, di mana korban direkrut melalui iklan pekerjaan palsu untuk bekerja di pusat-pusat penipuan online. Pusat-pusat penipuan online yang awalnya terkonsentrasi di Kamboja kini telah menyebar ke Laos dan Myanmar. Saat ini, pusat

³ Ruslan, Abdul Gani, and Yudiarmansyah. “Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia.” *Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ FENOMENA* 8.2 (2016): n. pag. Print. Diakses 23 November 2024.

⁴ News, Detik. “Polisi Ungkap Sindikat TPPO Jual Beli Ginjal Di Kamboja.” *Dw.com*. Deutsche Welle. N.p., 2023. Print. Diakses 21 November 2024.

perdagangan manusia telah diidentifikasi di setidaknya empat negara Asia lainnya, dan ada bukti bahwa metode ini juga digunakan di wilayah lain seperti Afrika Barat. Keragaman geografis korban juga meningkat, dengan korban yang sebelumnya banyak berasal dari Cina, Malaysia, Thailand, atau Singapura, kini berasal dari Amerika Selatan, Afrika Timur, dan Eropa Barat.⁵

Peran Interpol dalam menangani kasus perdagangan organ di Kamboja tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mencakup langkah-langkah proaktif. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap pola kejahatan dan jaringan perdagangan organ, Interpol dapat mengidentifikasi potensi kasus serupa di masa depan dan mengambil langkah preventif untuk mencegahnya. Kerja sama dengan otoritas setempat di Kamboja juga menjadi faktor penting dalam menyelesaikan kasus ini dengan efektif.

Dalam tulisan ini, penulis menganalisis berbagai penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, dengan mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang telah dibahas sebelumnya. Penulis juga mengumpulkan informasi dari sejumlah buku dan kajian yang ada untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan penjelasan-pejelasan yang sesuai dengan topik penelitian. Dengan demikian, penulis berupaya untuk merumuskan kerangka teoritis yang kuat yang dapat mendukung argumen dan temuan dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu terdapat jurnal berjudul “Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kamboja” *Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL)*”. Jurnal ini ditulis oleh Vianda Sonia Adellia, Fuat Albayumi, Bagus Sigit Sunarko. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Penelitian ini mengungkap bahwa struktur pemerintahan Kamboja yang tertutup dan sepenuhnya dikendalikan oleh negara menjadi penghambat utama dalam upaya memberantas perdagangan manusia. Pemerintah membatasi akses organisasi internasional yang ingin bekerja sama, terutama dalam penerapan norma hak asasi manusia (HAM).

⁵ Interpol.int. “INTERPOL Issues Global Warning on Human Trafficking-Fueled Fraud.” www.interpol.int. N.p., 7 June 2023. Print. Diakses 19 November 2024.

Akibatnya, organisasi non-pemerintah internasional (INGO) yang berupaya bekerja sama dengan Kamboja mengalami banyak kendala. Kurangnya keterbukaan dari pemerintah setempat membuat berbagai inisiatif dan bantuan internasional tidak bisa berjalan dengan optimal.

Upaya koalisi internasional untuk memprioritaskan isu perdagangan manusia di Kamboja belum mencapai tujuan. Meskipun banyak program dan inisiatif telah diluncurkan, kompleksitas birokrasi dan pembatasan dari pemerintah Kamboja menghambat kemajuan. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan internasional saja tidak cukup untuk mendorong perubahan kebijakan di Kamboja. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memperburuk perdagangan manusia di Kamboja. Tingginya angka kemiskinan membuat banyak masyarakat rentan menjadi korban, karena keterbatasan ekonomi memaksa mereka untuk menghadapi risiko tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat kurang memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk melindungi diri dari perdagangan manusia. Korupsi yang merajalela di kalangan pejabat pemerintah juga menghambat upaya pemberantasan, karena program-program bantuan sering terhambat oleh suap dan penyalahgunaan kekuasaan.

Faktor lain yang memperburuk keadaan adalah beban utang dan kurangnya lapangan pekerjaan, yang memaksa banyak orang untuk terlibat dalam perdagangan manusia demi memenuhi kebutuhan ekonomi atau melunasi utang. Tekanan ekonomi ini menciptakan siklus eksploitasi yang sulit dipecahkan. Akibat berbagai hambatan ini, kerja sama internasional untuk memberantas perdagangan manusia di Kamboja menjadi kurang efektif. Situasi ini menyebabkan Kamboja menjadi salah satu negara dengan tingkat perbudakan modern tertinggi di Asia Tenggara. Tanpa perubahan signifikan di dalam negeri, terutama terkait penegakan HAM dan pemberantasan korupsi, upaya untuk menurunkan angka perdagangan manusia di Kamboja tidak akan berhasil, meskipun ada dukungan dari luar negeri.⁶

⁶ Adellia, Vianda Sonia, Fuat Albayumi, and Bagus Sigit Sunarko. "Kerja Sama Transnasional Dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kamboja." *Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL)* 9.2 (2022): 38–62. Print. Diakses 11 November 2024

Dalam hal ini, penguatan kapasitas dan peningkatan kolaborasi antara Interpol dan peran berbagai pihak terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, sangat diperlukan. Dukungan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta partisipasi masyarakat luas juga memainkan peran krusial dalam mengatasi kasus perdagangan organ di Kamboja dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Interpol dalam menangani perdagangan organ di Kamboja selama periode 2021-2023. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan perdagangan organ manusia di tingkat global.

PEMBAHASAN

Fenomena penjualan organ manusia di Indonesia merupakan salah satu isu yang mencerminkan kompleksitas masalah sosial, ekonomi, dan hukum di negara ini. Perdagangan organ tubuh adalah tindakan yang secara tegas dilarang oleh hukum Indonesia, namun kenyataannya masih banyak kasus yang terjadi, baik secara terang-terangan maupun melalui jalur pasar gelap. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tegas melarang jual beli organ tubuh manusia. Meskipun demikian, tingginya permintaan akan organ tubuh untuk transplantasi dan minimnya ketersediaan donor legal mendorong praktik ilegal ini tetap eksis.⁷

Menurut teori kejahatan transnasional (Teori Transnasional Crime), Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang melibatkan pelaku dari berbagai negara dan beroperasi lintas batas. Contohnya adalah perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan kejahatan siber. Pelaku biasanya bekerja dalam jaringan terorganisasi yang memanfaatkan perbedaan hukum antarnegara atau lemahnya penegakan hukum di beberapa wilayah. Mereka sering memilih negara dengan sistem hukum yang lemah untuk menghindari hukuman. Kejahatan ini juga sering terjadi di daerah miskin atau dengan konflik sosial, karena kondisi tersebut membuat lebih mudah merekrut orang

⁷ Bernadetha Aurelia Oktavira. "Jerat Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia". hukumonline.com. (2023). Diakses 21 Januari 2025.

atau menggunakan wilayah tersebut sebagai basis operasi.⁸ Perdagangan organ tubuh manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan kriminal terorganisir yang beroperasi di berbagai negara.

Jaringan ini sering memanfaatkan perbedaan regulasi atau lemahnya penegakan hukum di beberapa negara untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka. Kondisi sosial-ekonomi yang rentan, seperti kemiskinan dan konflik sosial, sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut individu sebagai korban perdagangan organ. Fenomena ini menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia untuk memberantas perdagangan organ tubuh manusia.⁹ Perdagangan organ tubuh manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang kompleks dan melibatkan berbagai negara, termasuk Indonesia dan Kamboja. Kejahatan ini melibatkan jaringan internasional yang terorganisir, memanfaatkan ketidaksetaraan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum di beberapa negara. Menurut Global Financial Integrity (GFI), perdagangan organ tubuh manusia dikategorikan sebagai kejahatan transnasional.¹⁰

A. Peran Interpol Indonesia dalam memfasilitasi kerja sama internasional Interpol, atau International Criminal Police Organization, berperan penting dalam menanggulangi kejahatan transnasional melalui kerja sama internasional yang erat dengan berbagai negara. Sebagai organisasi polisi internasional terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa- Bangsa, Interpol mengoordinasikan upaya penegakan hukum lintas batas untuk menghadapi kejahatan seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, kejahatan siber, dan terorisme.¹¹

⁸ M Naseh, Ikhwanuddin, F Ramadhani, A Kusprabandaru, B Bathara. "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa". *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 8, No. 1. (2019). Diakses 21 Januari 2025.

⁹ Astuti Nur Fadillah & Abbas Mahmud. "Perdagangan Organ Tubuh Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Negara". *Print. BALOBE Law Journal* Vol. 3 No. 2 (2023). Diakses 21 Januari 2025. DOI:10.47268/balobe.v3i2.1822

¹⁰ Sonya Agustin. "Penjualan Organ Tubuh Manusia Melalui Transaksi Jual Beli Di Rumah Sakit Pemerintah (Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)". (2023). Diakses 21 Januari 2025.

¹¹ S A Fadhillah, M S Anastasia Matakupan, & B W Berlian Minggu. "Peran Interpol dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest On Cybercrimes". *Journal on Education* Volume 05, No. 04 (2023). Diakses 22 Januari 2025.

Interpol Indonesia yang berada di bawah ruang lingkup Polri memfasilitasi kerja sama pembuatan MoU Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementrian Dalam Negeri Kerajaan Kamboja Mengenai Kerjasama Pencegahan dan Kejahatan Transnasional dan Peningkatan pembangunan Kapasitas pada tanggal 16 Agustus 2023 yang bertempat di Labuan Bajo, Indonesia Penandatanganan tersebut dilakukan dalam rangkaian acara ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Organisasi internasional memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara untuk mencapai tujuan bersama. Menurut A. LeRoy Bennett, organisasi internasional memiliki beberapa fungsi utama, antara lain sebagai fasilitator, mediator, komunikator, dan advokat. Sebagai fasilitator, organisasi ini membantu negara-negara dalam memahami dan memecahkan masalah bersama. Dalam konteks teori Bennett, peran Interpol dapat dianalisis sebagai fasilitator, Interpol mengumpulkan dan menyebarkan informasi penting terkait kejahatan transnasional kepada negara-negara anggota.¹² Seperti yang dijelaskan oleh AKBP Januar Kencana S.I.K

“Peran Interpol Indonesia kita sudah memfasilitasi untuk melakukan kerja sama dengan cara mengirimkan surat police to police kepada Interpol Kamboja dan juga kita datang langsung ke Kamboja untuk melihat dan meninjau kasus secara langsung sehingga Interpol Indonesia bisa mendalami kasus penjualan organ tubuh manusia secara langsung, dan melakukan bantuan perlindungan kepada korban dan membawa pulang korban Kembali ke negara Indonesia. Setelah mendalami kasus ini, Interpol Indonesia memberikan Informasi kepada Polda Metro Jaya untuk menangkap beberapa tersangka di Bekasi dan akhirnya Polda Metro Jaya berhasil menangkap beberapa pelaku penjual organ tubuh manusia.”¹³

Menurut A. LeRoy Bennett, organisasi internasional memiliki fungsi utama sebagai sarana kerja sama antarnegara dalam berbagai bidang, termasuk

¹² Rendi Prayuda & Syafri Harto. “ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika”. (2020). Diakses 22 Januari 2025.

¹³ Hasil wawancara dengan AKBP Januar Kencana S.I.K dan Briptu Mufti Rozaq S.H. pada 16 Januari 2025.

keamanan dan penegakan hukum. Bennett mengklasifikasikan organisasi internasional menjadi dua kategori utama: intergovernmental organizations (IGOs) dan non-governmental organizations (NGOs). Interpol, sebagai IGO, berfungsi sebagai forum bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam menangani isu-isu kriminal yang melintasi yurisdiksi nasional.¹⁴

Peran Interpol Indonesia dalam menanggulangi kejahatan transnasional, seperti penjualan organ manusia, sangat penting Khususnya di Kamboja. Sebagai, Interpol Indonesia berfungsi sebagai fasilitator antara Kepolisian Indonesia dan Pemerintah Kamboja untuk menanggulangi Kejahatan transnasional khususnya perdagangan organ tubuh manusia dan menjadi fokus utama Interpol Indonesia dikarenakan banyaknya korban yang berasal dari Indonesia dan Interpol Indonesia berperan dalam pembuatan MoU kerja sama Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementrian Dalam Negeri Kerajaan Kamboja Mengenai Kerjasama Pencegahan dan Kejahatan Transnasional dan Peningkatan pembangunan Kapasitas.

Peran Interpol Indonesia sebagai Koordinator untuk menghubungkan antara Kepolisian Indonesia dan pihak Kepolisian Kamboja untuk melakukan penyidik dalam upaya pemberantasan penjualan organ tubuh manusia di Kamboja. Kaitan antara peran Interpol dan pendekatan Liberalisme Institusional terletak pada fungsi Interpol sebagai institusi internasional yang memfasilitasi kerjasama antarnegara dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Melalui Interpol, negara-negara dapat mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kejahatan lintas negara dengan berbagi informasi, sumber daya, dan keahlian. Pendekatan ini memungkinkan negara-negara untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral dan memastikan bahwa pelaku kejahatan transnasional, seperti perdagangan organ manusia, dapat ditangkap dan diadili secara efektif.¹⁵

Secara keseluruhan, peran Interpol dalam menanggulangi kejahatan transnasional, seperti penjualan organ manusia, sejalan dengan prinsip-

¹⁴ Muhammad Daffa Fadhilah. "Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pencegahan Pelanggaran HAM Di JAMMU-KASHMIR Periode 2016-2020". (2022). Diakses 22 Januari 2025.

¹⁵ Pangalila, Fretes, & Seba. "Peran National Central Bureau (Ncb)-Interpol Indonesia Dalam Penanganan Cybercrime (Romance Scam) Tahun 2018-2021". (2023). Print. Journal of International Studies, Volume 8, No.

1. Diakses 30 Januari 2025.

prinsip Liberalisme Institusional yang menekankan pentingnya kerjasama internasional melalui institusi untuk mengatasi masalah bersama. Melalui Interpol, negara-negara dapat bekerja sama secara efektif untuk memerangi kejahatan lintas negara dan memastikan keadilan bagi korban. Peran Interpol dalam menanggulangi kejahatan transnasional, seperti penjualan organ manusia, sangat penting dalam konteks kerjasama internasional. Sebagai organisasi polisi global, Interpol memfasilitasi koordinasi antarnegara untuk memberantas kejahatan lintas negara.

Teori Kerja Sama Internasional menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi isu-isu yang melintasi batas negara, seperti kejahatan transnasional. Interpol berfungsi sebagai platform yang memfasilitasi kerja sama ini dengan menyediakan sistem komunikasi global yang efektif, seperti I-24/7, yang memungkinkan pertukaran informasi kriminal secara real-time antara negara anggota. Melalui mekanisme ini, negara-negara dapat bekerja sama dalam mengidentifikasi, melacak, dan menangkap pelaku kejahatan yang beroperasi lintas batas.¹⁶ Maka, Peran Interpol dalam menanggulangi kejahatan transnasional sangat berkaitan dengan Teori Kerja Sama Internasional, yang menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara untuk menyelesaikan permasalahan global.

Kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan pencucian uang, tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Interpol berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai negara dalam pertukaran informasi, koordinasi investigasi, dan penangkapan pelaku kejahatan lintas batas. Melalui kerja sama ini, negara-negara dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mempersempit ruang gerak sindikat kejahatan internasional.

B. Peran Interpol Indonesia sebagai saluran komunikasi antar pemerintah Indonesia dan Kamboja

Sebagai mediator, Interpol membantu mengoordinasikan operasi lintas negara untuk menangkap pelaku kejahatan. Sebagai komunikator, Interpol memastikan aliran informasi yang efisien antara berbagai yurisdiksi hukum.

¹⁶ Dea Sonya Septiani. "Peran Interpol Indonesia Dalam Membantu Interpol Italia Terkait Ekstradisi Mafia Antonino Messicati Vitale (2012-2013)". Fisip UIN Jakarta. (2014). Diakses 21 Januari 2025.

Dan sebagai advokat, Interpol mendorong standar internasional dalam penegakan hukum dan keamanan.¹⁷ Namun ada kendala yang di hadapi saat menangani kasus penjualan organ tubuh manusia ini seperti yang di jelaskan oleh AKBP Januar Kencana S.I.K. “Saluran komunikasi antara polisi Indonesia dengan pemerintah Kamboja mengalami kendala yang sulit dikarenakan perdagangan organ manusia di Kamboja berada dibawah naungan militer yang berada di lokasi rumah sakit militer. Dengan begitu, saluran komunikasi dibatasi dan Interpol Indonesia tidak mendapatkan respon yang baik dari Interpol Kamboja”¹⁸

Organisasi internasional memainkan peran penting dalam saluran komunikasi antarnegara untuk memberantas kejahatan transnasional. Menurut A. LeRoy Bennett. Sebagai mediator, mereka berperan netral dalam menyelesaikan perselisihan. Sebagai komunikator, mereka menjadi sumber dalam hubungan komunikasi antarnegara. Dalam konteks teori Bennett, peran Interpol dapat dianalisis sebagai berikut: Sebagai mediator, Interpol membantu mengoordinasikan operasi lintas negara untuk menangkap pelaku kejahatan. Sebagai komunikator, Interpol memastikan aliran informasi yang efisien antara berbagai yurisdiksi hukum. Dan sebagai advokat, Interpol mendorong standar internasional dalam penegakan hukum dan keamanan.¹⁹

Dalam hal ini, Interpol Indonesia bekerja sama dengan Interpol Kamboja membantu dalam pertukaran informasi dan melaksanakan operasi bersama untuk menangkap pelaku perdagangan organ manusia, yang sering kali terjadi di Kamboja dan juga banyaknya korban berasal dari Indoneisa. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip Liberalisme Institusional, yang menekankan bahwa meskipun negara memiliki kepentingan yang berbeda, mereka bisa bekerja sama melalui lembaga internasional seperti Interpol untuk mengatasi masalah bersama yang tidak bisa diselesaikan secara unilateral.

¹⁷ Rendi Prayuda & Syafri Harto. “ ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika”. (2020). Diakses 22 Januari 2025.

¹⁸ Hasil wawancara dengan AKBP Januar Kencana S.I.K dan Briptu Mufti Rozaq S.H. pada 16 Januari 2025

¹⁹ Rendi Prayuda & Syafri Harto. “ ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika”. (2020). Diakses 22 Januari 2025.

Pendekatan Liberalisme Institusional menganggap bahwa institusi internasional penting dalam memfasilitasi kerjasama antarnegara untuk mengatasi tantangan global, termasuk kejahatan transnasional. Dalam konteks penjualan organ manusia, pendekatan ini menunjukkan bahwa kerjasama internasional yang difasilitasi oleh Interpol memungkinkan negara-negara untuk berbagi informasi, keahlian, dan sumber daya dalam menangani kejahatan yang melibatkan beberapa negara. Hal ini penting untuk menciptakan tindakan kolektif yang lebih efektif dalam menanggulangi perdagangan organ manusia dan memberi keadilan bagi korban. Secara keseluruhan, hubungan antara peran Interpol dan pendekatan Liberalisme Institusional terlihat dalam bagaimana Interpol sebagai lembaga internasional mengatur dan memfasilitasi kerjasama antarnegara dalam penanggulangan kejahatan transnasional.

Ini memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama lebih efektif, mengatasi tantangan bersama, dan memastikan pelaku kejahatan dapat diadili sesuai hukum internasional. Teori Transnasional Crime mengkaji kejahatan yang operasinya melintasi batas negara dan melibatkan pelaku dari berbagai yurisdiksi. Interpol berperan penting dalam mengatasi tantangan ini dengan mengoordinasikan upaya penegakan hukum antarnegara. Sebagai contoh, dalam menangani isu perdagangan manusia di wilayah Indonesia, Interpol berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan otoritas penegak hukum dari berbagai negara untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah tersebut.²⁰

MoU kerja sama Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementrian Dalam Negeri Kerajaan Kamboja Mengenai Kerjasama Pencegahan dan Kejahatan Transnasional dan Peningkatan pembangunan Kapasitas menjadi landasan pertukaran data intelijen kedua negara, khususnya terkait kasus perdagangan organ tubuh manusia, dan kejahatan terorganisir. Indonesia dan Kamboja sepakat untuk membentuk mekanisme pertukaran informasi real-time mengenai keberadaan tersangka atau korban kejahatan transnasional. Peningkatan kapasitas dan pelatihan, Indonesia

²⁰ Sara Gabriella. "Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia". *Print. Journal of International Studies* (2019). Diakses 30 Januari 2025.

memberikan pelatihan peningkatan kapasitas kepada kepolisian Kamboja yang mencakup teknik investigasi digital, identifikasi korban dan perlindungan saksi. Pelatihan bersama berfokus pada penanganan kasus-kasus kompleks seperti perdagangan manusia yang berbasis teknologi canggih Koordinator Antar lembaga Kedua negara mengadopsi protokol bersama untuk menangani kasus penyelundupan manusia, termasuk memantau kerentanan di wilayah yang rawan untuk di lewati oleh jaringan perdagangan manusia.

Implementasi ini menunjukkan bagaimana teori kejahatan transnasional dapat diterjemahkan ke dalam langkah operasional melalui koordinasi kebijakan, penggunaan teknologi, dan kolaborasi multidisiplin. Tantangan seperti perbedaan peraturan dan kemampuan sumber daya diatasi melalui pendekatan bertahap, termasuk pelatihan berkelanjutan dan peningkatan sistem database bersama Interpol memainkan peran kunci dalam mengatasi kejahatan ini dengan menyatukan upaya penegakan hukum dari berbagai yurisdiksi. Dengan sistem basis data global dan jaringan komunikasi yang luas, Interpol membantu negara-negara dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan yang berpindah antarnegara. Tanpa koordinasi yang baik, kejahatan transnasional akan semakin sulit diberantas karena para pelaku dapat dengan mudah bersembunyi di negara-negara dengan penegakan hukum yang lemah.

Menurut LeRoy Bennett, organisasi internasional berfungsi sebagai sarana bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dan mengatasi masalah global. Interpol, sebagai organisasi internasional, memenuhi peran ini dengan menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk berkolaborasi dalam penanggulangan kejahatan internasional dan transnasional. Interpol memfasilitasi pertukaran informasi, koordinasi operasi penegakan hukum, dan pengembangan kapasitas di antara negara anggota, sehingga memperkuat upaya kolektif dalam memerangi kejahatan lintas batas.²¹

²¹ Muh. Ardhan Arwin. "Peran Interpol Indonesia Di Wilayah Regional Asean". (2013). Diakses 30 Januari 2025.

C. Peran Interpol Indonesia sebagai penyedia administrasi

Sebagai organisasi internasional, Interpol memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi antara negara anggota untuk menghadapi ancaman kriminal yang melintasi batas negara. Melalui sistem jaringan seperti I-24/7, Interpol memungkinkan penegak hukum di berbagai negara untuk berbagi data kriminal secara real-time, mempercepat proses identifikasi dan penangkapan pelaku kejahatan. Interpol juga mengeluarkan notifikasi seperti Red notice, Penerbitan Red Notice Interpol sebagai permintaan kepada negara anggota untuk menemukan dan menahan sementara individu yang dicari berdasarkan permintaan negara lain. Meskipun Red Notice bukanlah surat perintah penangkapan internasional, namun menjadi alat penting dalam melacak dan menahan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain. Efektivitas Red Notice tergantung pada kerja sama dan kesediaan negara anggota untuk menindaklanjutinya sesuai dengan hukum nasional masing-masing.²² Sistem kerja sama ini mendukung instrumen hukum internasional lainnya dalam penanggulangan kejahatan transnasional, seperti pelaksanaan mutual legal assistance dan ekstradisi.²³

Dalam upaya memberantas perdagangan manusia, Interpol Indonesia terdapat beberapa proses administrasi yang sangat panjang dan memakan waktu yang begitu lama menurut Briptu Mufti Rozaq S.H

“Proses administrasi dalam menangani kasus lintas batas diperlukan beberapa tahapan yaitu:

- a. Pertama, Interpol Indonesia mengkoordinasi dengan kementerian luar negeri terkait acara berita tentang Tindak Pidana Organ Organ. Kedua,
- b. Kedua, Interpol Indonesia mengkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mengecek jejak perjalanan warga negara Indonesia yang melewati lintas batas negara atas dugaan terkait Tindak Pidana Perdagangan Organ.

²² T D Hardianti, Muhammad Rum, IMAS.“Efektivitas Rezim Interpol Dalam Menangani Kasus 'Kejahatan Internasional' Oleh Negara Anggota Represif Tahun 2012-2017 Melalui Sistem Red Notice”.(2019). Diakses 21 Januari 2025.

²³ Ryzza Dharma.“ Peran International Criminal Police Organization pada penanganan kasus tindak pidana dalam perspektif hukum Internasional (Studi kasus: pencarian dan penangkapan M. Nazaruddin)”. (2012). Diakses 22 Januari 2025.

c. Ketiga, Interpol Indonesia memberikan surat kepada Kedutaan Besar Kamboja untuk memberitahu kerja sama terkait Tindak Pidana Perdagangan Organ.

d. Keempat, Interpol Indonesia memberikan laporan kepada Interpol Secretariat General melalui website I-24/7 bahwa ada kejadian Tindak Pidana Perdagangan Organ di Kamboja.”²⁴

Melalui jaringan ini, Indonesia dapat berkoordinasi dengan Kamboja untuk melacak dan menangkap pelaku perdagangan manusia yang beroperasi secara internasional di kedua negara.²⁵ Terkait penjualan organ tubuh, Interpol Indonesia berperan dalam mengidentifikasi dan membongkar jaringan kriminal yang terlibat dalam praktik ilegal ini, beberapa kasus penjualan organ tubuh manusia di Indonesia telah terungkap ke publik, meskipun banyak di antaranya yang tidak dilaporkan atau sulit dilacak. Pada tahun 2022, terdapat laporan tentang jaringan perdagangan organ internasional di Kamboja yang melibatkan warga negara Indonesia. Kasus ini mencakup praktik ilegal pembelian organ dari kamboja untuk kemudian dijual kembali ke pasien di Indonesia. Meskipun tantangan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan organ tubuh manusia masih ada, Interpol Indonesia terus berupaya meningkatkan kerjasama internasional dan pertukaran informasi untuk menanggulangi kejahatan ini.²⁶

Dalam upaya memberantas perdagangan manusia, Interpol menyediakan platform untuk pertukaran data dan intelijen antara negara anggota. Melalui jaringan ini, Indonesia dapat berkoordinasi dengan negara lain untuk melacak dan menangkap pelaku perdagangan manusia yang beroperasi secara internasional. Selain itu, Interpol juga memberikan pelatihan kepada personel kepolisian negara anggota untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani kejahatan transnasional.²⁷ Terkait penjualan organ tubuh, Interpol berperan dalam mengidentifikasi dan membongkar jaringan kriminal

²⁴ Hasil wawancara dengan AKBP Januar Kencana S.I.K dan Briptu Mufti Rozaq S.H. pada 16 Januari 2025

²⁵ Sara Gabriella. “Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia”. *Print.Journal of International Studies* (2019). Diakses 10 Januari 2025.

²⁶ Dien Fahrur Romadhoni. “Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Ketidakadilan Kemanusiaan Dan Dampak Sosialnya”. *Print.Jurnal Ilmu Kepolisian* (2023). Diakses 10 Januari 2025.

²⁷ Sara Gabriella. “Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia”. *Print.Journal of International Studies* (2019). Diakses 10 Januari 2025.

yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Meskipun tantangan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan organ tubuh manusia masih ada, Interpol terus berupaya meningkatkan kerjasama internasional dan pertukaran informasi untuk menanggulangi kejahatan ini.²⁸

Selain itu, Interpol juga menerbitkan notifikasi seperti red notice untuk membantu negara anggota dalam menangkap buronan yang terlibat dalam kejahatan transnasional. Red notice diterbitkan ke seluruh NCB-Interpol di negara anggota untuk mencari dan menangkap individu yang dicari oleh negara lain.²⁹ Secara keseluruhan, peran Interpol dalam menanggulangi kejahatan transnasional sangat vital. Melalui koordinasi, pertukaran informasi, pelatihan, dan penerbitan notifikasi, Interpol membantu negara anggota, termasuk Indonesia, dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas batas yang semakin kompleks.³⁰

LeRoy Bennett mengemukakan bahwa organisasi internasional berperan sebagai wadah bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam mencapai kepentingan bersama dan mengatasi permasalahan global. Interpol, sebagai organisasi internasional di bidang penegakan hukum, mencerminkan konsep ini dengan menyediakan mekanisme kerja sama bagi lebih dari 190 negara anggota. Interpol tidak memiliki kewenangan untuk menangkap pelaku kejahatan secara langsung, tetapi berperan sebagai penghubung antara kepolisian di berbagai negara dalam rangka menanggulangi kejahatan lintas batas. Dengan demikian, Interpol menjadi contoh nyata bagaimana organisasi internasional dapat membantu negara-negara mengatasi tantangan global secara kolektif.

Kejahatan transnasional sering kali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan kejahatan terorganisir lainnya. Peran Interpol dalam memerangi kejahatan-kejahatan ini sejalan dengan upaya perlindungan hak asasi manusia. Dengan mengoordinasikan penegakan hukum internasional dan memastikan bahwa

²⁸ Dien Fahrur Romadhoni. "Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Ketidakadilan Kemanusiaan Dan Dampak Sosialnya". Print. Jurnal Ilmu Kepolisian (2023). Diakses 10 Januari 2025.

²⁹ Dea Sonya Septiani. "Peran INTERPOL Indonesia Dalam Membantu INTERPOL Italia Terkait Ekstradisi Mafia Antonino Messicati Vitale (2012-2013)". Print. (2014). Diakses 10 Januari 2025.

³⁰ Alya Natasya & Tulus Yuniasih. "NCB-Interpol Indonesia dalam Penanganan Permasalahan Narkotika Lintas Batas di Selat Malaka 2020 – 2022". Print. (2023). Diakses 11 Januari 2025.

pelaku kejahatan transnasional diadili, Interpol membantu menegakkan hak-hak dasar individu dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Selain itu, Interpol bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya untuk memastikan bahwa operasi penegakan hukum menghormati dan melindungi hak asasi manusia.³¹

Oleh karena itu, banyak bentuk kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan terorisme, secara langsung melanggar hak asasi manusia. Interpol memiliki peran strategis dalam membantu negara-negara melindungi hak asasi manusia dengan menangkap pelaku kejahatan serta membongkar jaringan sindikat yang mengeksploitasi individu. Selain itu, Interpol bekerja sama dengan lembaga internasional lainnya untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak dasar setiap individu, termasuk tersangka yang sedang dalam proses hukum. Dengan demikian, peran Interpol tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.

D. Efektivitas Interpol Indonesia dalam Menangani Kejahatan Lintas Batas di Kamboja

Perdagangan organ tubuh manusia, khususnya ginjal, merupakan masalah serius di Kamboja yang melibatkan jaringan internasional. Transplantasi dilakukan di India, dengan pasien penerima berasal dari Kamboja. Keterlibatan pendonor yang terdesak kebutuhan ekonomi membuat kejahatan ini jarang dilaporkan dan sulit diungkap.³² Pada tahun 2023, Polda Metro Jaya mengungkap sindikat perdagangan ginjal yang melibatkan 122 WNI yang menjalani transplantasi ginjal di Rumah Sakit Preah Ket Mealea, Kamboja. Para korban direkrut melalui media sosial dan diiming-imingi uang hingga Rp 135 juta. Sindikat ini telah beroperasi sejak 2019 dengan omzet mencapai Rp 24,4 miliar.³³

³¹ Mutiara Risdiyafani Ramadhan. "Upaya Ncb-Interpol Indonesia Dalam Penanganan Cybercrime: Business Email Compromise Tahun 2022".(2024). Diakses 30 Januari 2025.

³² Kompas.com. "Beli Ginjal Rp 77 Juta, Jual Lagi Seharga Rp 531 Juta".(2017). Diakses 11 Januari 2025.

³³ Detik. "Polisi Ungkap Sindikat TPPO Jual Beli Ginjal di Kamboja".(2023). Diakses 11 Januari 2025.

Interpol, sebagai organisasi kepolisian internasional, berperan dalam memfasilitasi kerja sama antara negara-negara anggotanya untuk menangani kejahatan lintas batas seperti perdagangan organ. Tantangan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan organ di Kamboja diperparah oleh faktor-faktor seperti korupsi, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur hukum. Dalam konteks Indonesia, keterlibatan WNI dalam sindikat perdagangan organ di Kamboja menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia, melalui kerjasama dengan Interpol dan otoritas negara lain, perlu memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap sindikat perdagangan organ yang melibatkan warga negaranya. Hal ini termasuk pengetatan pengawasan di perbatasan, edukasi masyarakat, dan penindakan tegas terhadap oknum yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Secara keseluruhan, meskipun Interpol telah mengambil langkah-langkah untuk menangani perdagangan organ lintas batas di Kamboja, tantangan yang kompleks memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat internasional, untuk secara efektif memberantas kejahatan ini.³⁴

Interpol Indonesia, memiliki peran penting dalam menangani kejahatan perdagangan organ tubuh manusia di Kamboja melalui berbagai mekanisme kerja sama dan pertukaran informasi dengan Interpol Kamboja. Efektivitas Interpol Indonesia dalam menangani kejahatan perdagangan organ tubuh manusia dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- 1) Jaringan Informasi Global: Interpol menyediakan platform bagi negara-negara anggota untuk berbagi informasi. Hal ini di manfaatkan oleh Interpol Indonesia dan Interpol Kamboja untuk memberantas terkait kejahatan transnasional yaitu perdagangan organ tubuh manusia. Melalui jaringan ini, data mengenai pelaku kejahatan, modus operandi, dan tren kejahatan dapat diakses oleh penegak hukum di kedua negara.

³⁴ Kompas.com. "Beli Ginjal Rp 77 Juta, Jual Lagi Seharga Rp 531 Juta". (2017). Diakses 11 Januari 2025.

Hal ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi kejahatan lintas batas.³⁵

2) Koordinasi dengan Organisasi Regional: Interpol Indonesia dan Interpol Kamboja bekerja sama dengan organisasi regional, seperti ASEAN, untuk memperkuat upaya penanggulangan kejahatan transnasional seperti perdagangan organ tubuh manusia di Kamboja. Melalui kerja sama ini, Interpol Indonesia dan Interpol Kamboja dapat membantu negara-negara ASEAN lainnya dalam mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi di kawasan Asia Tenggara.³⁶

Menurut AKBP Januar Kencana S.I.K menjelaskan untuk meningkatkan efektivitas Interpol Indonesia dalam menangani kasus lintas batas di kamboja seharusnya

“Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi perdagangan organ tubuh manusia di masa depan dengan menggunakan cara yaitu:

a. Interpol Indonesia bekerja sama dengan Polri melalui BINMAS untuk sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang

b. Interpol Indonesia bekerjasama dengan Imigrasi untuk mengidentifikasi warga negara Indonesia dengan cermat yang ingin melakukan liburan ke luar negeri dan yang ingin akan melakukan TPPO. Imigrasi menggunakan dua analisis, yaitu dari gerak tubuh dan juga paspor yang belum lama terbitnya.³⁷ dan menurut AKBP Januar Kencana S.I.K Interpol sendiri perlu adanya evaluasi yang lebih baik untuk memberantas kasus kejahatan transnasional yang sering terjadi“

Evaluasi yang dilakukan oleh Interpol Indonesia terkait kinerjanya perlu adanya peningkatan dalam administrasi terlalu rumit sehingga banyak kasus TPPO yang tidak diselesaikan dengan cepat. Adapun terkait fasilitas yang diberikan oleh negara yang diminta bantuan sangat minim dan tidak

³⁵ A R Saksono & I Made Tjatrayasa. “ Fungsi Dan Peran International Criminal Police Organization- Interpol Dalam Ekstradisi”.(2016). Diakses 21 Januari 2025.

³⁶ Felix Ferdin Bakker, Andhika Parama Putra, Respati Triana Putri. “ Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Isu- Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia Tenggara (The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnational Crime in the Southeast Asia Region)”.Vol 2,No.1. (2020). Diakses 21 Januari 2025.

³⁷ Hasil wawancara dengan AKBP Januar Kencana S.I.K dan Briptu Mufti Rozaq S.H. pada 16 Januari 2025

merespon dengan baik, sehingga Interpol Indonesia bisa melaporkan kepada Interpol Secretariat General bahwa Interpol Kamboja tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan para negara anggota. Dengan begitu, dapat dilakukan sidang umum tahunan Interpol. Namun, kelebihan Interpol Indonesia dapat mengeksekusi tersangka TPPO dengan informasi yang minim”³⁸

Liberalisme institusional menekankan pentingnya institusi internasional dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam konteks ini, Interpol berfungsi sebagai organisasi internasional yang memfasilitasi kerja sama polisi di berbagai negara untuk menangani kejahatan transnasional seperti perdagangan organ manusia. Dengan adanya Interpol, negara-negara dapat berbagi informasi, sumber daya, dan strategi untuk memberantas kejahatan tersebut secara efektif. Sebagai contoh, kerjasama antara National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia dengan pemerintah Kamboja dalam menangani kasus perdagangan manusia yang menimpa WNI di Kamboja menunjukkan peran penting institusi internasional dalam memfasilitasi kerja sama lintas negara.³⁹

Maka, Pendekatan liberalisme institusional menekankan bahwa institusi internasional memiliki peran penting dalam mendorong kerja sama antarnegara untuk mencapai kepentingan bersama, termasuk dalam penegakan hukum dan keamanan. Dalam konteks penanganan perdagangan organ manusia di Kamboja, Interpol berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan berbagai negara untuk berbagi informasi, menyusun strategi bersama, dan mengoordinasikan tindakan terhadap jaringan kriminal transnasional. Dengan adanya Interpol, negara-negara dapat mengatasi keterbatasan masing-masing dalam sumber daya dan yurisdiksi, sehingga

³⁸ Hasil wawancara dengan AKBP Januar Kencana S.I.K dan Briptu Mufti Rozaq S.H. pada 16 Januari 2025

³⁹ Tarisya Alifia. “Kerjasama National Central Bureau (Ncb) Interpol Indonesia Dengan Pemerintah Kamboja Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia Yang Menimpa Warga Negara Indonesia Di Kamboja Tahun 2021 – 2022”. (2023). Diakses 30 Januari 2025.

meningkatkan efektivitas dalam menangani kejahatan lintas batas ini secara kolektif.

Teori ini menyoroti bagaimana negara-negara bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi masalah bersama, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti kejahatan transnasional. Dalam konteks perdagangan organ manusia, kerjasama internasional melalui perjanjian seperti Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) memungkinkan negara-negara untuk saling membantu dalam investigasi dan penegakan hukum terkait kejahatan tersebut. Penelitian mengenai efektivitas MLAT dalam investigasi kasus penjualan ginjal di Kamboja menunjukkan bahwa perjanjian semacam ini dapat meningkatkan kerjasama hukum antarnegara dalam memberantas perdagangan organ manusia.⁴⁰

Teori kerjasama internasional menyoroti bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk mengatasi permasalahan global, terutama ketika tantangan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan secara unilateral. Perdagangan organ manusia merupakan kejahatan yang melibatkan banyak negara, baik sebagai tempat asal korban, transit, maupun tujuan akhir. Interpol berperan sebagai perantara yang memfasilitasi koordinasi antarnegara dalam upaya investigasi, penangkapan pelaku, serta pemulihan korban. Dengan memanfaatkan jaringan globalnya, Interpol meningkatkan efektivitas kerja sama antarnegara dalam membongkar sindikat perdagangan organ yang beroperasi lintas batas.

Teori Transnasional Crime berfokus pada kejahatan yang melintasi batas negara dan memerlukan kerjasama internasional untuk penanganannya. Perdagangan organ manusia adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional yang kompleks, melibatkan jaringan kriminal di berbagai negara. Interpol, sebagai organisasi internasional, berperan penting dalam mengoordinasikan upaya penegakan hukum antarnegara untuk mengatasi kejahatan semacam ini. Studi mengenai peran hukum internasional dalam memerangi perdagangan manusia menekankan pentingnya kerjasama dan

⁴⁰ Saragih, Aditama, & Siahaan. "Effectiveness of Mutual Legal Assistance Treaty in Investigating Indonesian Kidney Sale Crimes in Cambodia". (2024). *Jurnal Ius Constituendum*. Volume 9 Nomor 3. DOI: 10.26623/jic.v9i3.10240. Diakses 30 Januari 2025.

koordinasi antarnegara serta peran organisasi internasional seperti Interpol dalam mengatasi kejahatan transnasional.⁴¹

Oleh karena itu, Teori kejahatan transnasional menjelaskan bahwa kejahatan yang melintasi batas negara terjadi akibat adanya celah hukum, perbedaan regulasi, serta lemahnya sistem pengawasan di beberapa wilayah. Perdagangan organ manusia di Kamboja menjadi salah satu contoh nyata di mana jaringan kriminal memanfaatkan faktor ekonomi, sosial, dan politik untuk menjalankan operasi mereka. Interpol memainkan peran penting dalam mengatasi hambatan ini dengan menyediakan data intelijen, menyusun strategi penegakan hukum yang bersifat transnasional, serta memperkuat koordinasi antarpenghak hukum di berbagai negara untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh sindikat kriminal.

Dalam Konsep Organisasi Internasional, menurut LeRoy Bennett mengidentifikasi beberapa fungsi utama organisasi internasional, termasuk sebagai fasilitator, mediator, dan komunikator dalam hubungan internasional. Dalam konteks ini, Interpol berfungsi sebagai fasilitator dengan menyediakan platform bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam penegakan hukum, sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa terkait kejahatan lintas batas, dan sebagai komunikator dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi penting terkait kejahatan transnasional. Fungsi-fungsi ini memungkinkan Interpol untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan seperti perdagangan organ manusia melalui kerjasama internasional yang lebih baik.⁴²

Maka, menurut teori LeRoy Bennett, organisasi internasional berfungsi sebagai fasilitator, mediator, dan komunikator dalam hubungan internasional. Interpol, dalam menangani perdagangan organ manusia di Kamboja, bertindak sebagai pusat koordinasi global yang membantu negara-negara dalam mengidentifikasi pelaku, melacak jaringan kriminal, dan mengoordinasikan upaya penegakan hukum. Selain itu, Interpol juga

⁴¹ Deri Wicaksono Surya. "Peran Hukum Internasional dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur". (2024). ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.2, No.2. DOI: <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.792>. Diakses 30 Januari 2025.

⁴² Rendi Prayuda & Syafri Harto. "ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika". (2020). Diakses 30 Januari 2025.

berperan sebagai perantara dalam memediasi kerja sama lintas negara dan memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil sesuai dengan standar internasional. Fungsi ini menunjukkan bagaimana organisasi internasional dapat meningkatkan efektivitas negara-negara dalam menghadapi tantangan global yang kompleks.

Teori Hak Asasi Manusia menekankan bahwa perlindungan terhadap hak-hak fundamental setiap individu. Perdagangan organ manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Dalam upaya memberantas kejahatan ini, Interpol bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk memastikan bahwa pelaku diproses secara hukum dan korban mendapatkan perlindungan serta rehabilitasi yang diperlukan.⁴³

Maka, Perdagangan organ manusia merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan, kebebasan, dan integritas tubuh. Teori hak asasi manusia menekankan pentingnya perlindungan individu dari eksploitasi serta tanggung jawab negara dan organisasi internasional dalam menjamin keadilan bagi korban. Dalam hal ini, Interpol tidak hanya berperan dalam menindak pelaku kejahatan, tetapi juga membantu dalam upaya penyelamatan dan rehabilitasi korban dengan bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan dan pemerintah negara-negara yang terlibat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas Interpol dalam menangani kejahatan lintas batas tidak hanya diukur dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari upaya pemulihan hak-hak korban.

Peran strategis Interpol Indonesia berperan penting dalam menanggulangi kejahatan lintas batas melalui kerja sama internasional. Sebagai fasilitator, mediator dan komunikator, Interpol membantu mengkoordinasikan operasi lintas batas, menyebarkan informasi penting dan mempromosikan standar internasional dalam penegakan hukum. Dalam kasus perdagangan organ tubuh manusia di Kamboja, Interpol Indonesia berhasil memfasilitasi kerja sama dengan pihak berwenang Kamboja dan membawa para korban kembali

⁴³ Deri Wicaksono Surya. "Peran Hukum Internasional dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur". (2024). ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.2, No.2. DOI: <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.792>. Diakses 30 Januari 2025.

ke Indonesia. Efektivitas penanganan kasus perdagangan organ Ketika menangani kasus perdagangan organ tubuh manusia di Kamboja yang melibatkan warga negara Indonesia, Interpol Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain terbatasnya komunikasi dengan pihak berwenang Kamboja dan prosedur administrasi yang panjang. Namun melalui koordinasi dengan Polri, beberapa pelaku penjual organ tubuh manusia berhasil ditangkap di Indonesia.

Tantangan utama yang di hadapi dalam menangani kasus ini termasuk korupsi di negara tujuan, terbatasnya infrastruktur hukum dan kurangnya respon dari pihak berwenang Kamboja. Selain itu, proses administrasi yang rumit memperlambat penyelesaian kasus. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa sistem kerja sama internasional perlu dikaji ulang Untuk meningkatkan kemampuan dan kerja sama, Interpol Indonesia memanfaatkan jaringan global seperti I-24/7 untuk berbagi informasi secara real time dan mengeluarkan red notice untuk melacak penjahat. Namun efektivitas langkah-langkah tersebut masih bergantung pada kerja sama antar negara dan komitmen semua pihak yang terlibat. Dampak Ekonomi dan Sosial juga berpengaruh Korban kasus perdagangan organ tubuh manusia seringkali berasal dari kelompok rentan yang tertekan oleh tuntutan ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan melalui pendidikan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

kesimpulan mendalam mengenai peran Interpol Indonesia dalam menangani kasus penjualan organ tubuh manusia di Kamboja tahun 2021 - 2023. Bab ini menguraikan temuan-temuan utama yang menggambarkan kompleksitas dan tantangan upaya pemberantasan kejahatan transnasional ini. Menegaskan peran Interpol Indonesia sebagai jembatan penting bagi kerja sama internasional seperti dengan pemerintah Kamboja untuk memberantas penjualan organ tubuh manusia di Kamboja.

Interpol Indonesia mengandalkan jaringannya yang luas dan sistem komunikasi yang efisien untuk berhasil mengoordinasikan berbagai operasi penegakan hukum yang di miliki oleh Interpol yang melibatkan banyak

negara. Dengan mengeluarkan Red Notice, Interpol membantu negara-negara anggota menangkap penjahat yang bersembunyi di luar negeri termasuk Interpol Indonesia yang bekerja sama secara aktif untuk mengungkap kasus penjualan organ tubuh manusia di Kamboja. Hal ini menunjukkan keefektifan peran Interpol Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan lintas batas seperti perdagangan tubuh manusia yang seringkali sulit diselesaikan oleh lembaga penegak hukum setempat.

Selain itu, dukungan teknis yang diberikan Interpol Indonesia kepada kepolisian Kamboja juga menjadi sorotan. Program melalui pengetahuan yang dibutuhkan untuk menangani kasus perdagangan organ secara lebih efektif. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan dalam penyelidikan, pengumpulan bukti, dan pemahaman hukum internasional yang relevan. Dengan cara ini, Interpol Indonesia tidak hanya bertindak sebagai penghubung antara Kepolisian Indonesia dan Pemerintah Kamboja, namun

juga menyediakan sumber daya penting untuk memerangi kejahatan ini. Namun, meskipun ada kemajuan, masih ada beberapa tantangan signifikan yang harus diatasi. Salah satu tantangan utamanya adalah Kamboja, memiliki sumber daya yang terbatas. Kurangnya pendanaan dan personel yang terlatih dapat menghambat upaya penegakan dan pencegahan perdagangan organ.

Interpol Indonesia juga fokus kepada Pentingnya pendekatan holistik dalam menangani masalah perdagangan organ tubuh manusia. Hal ini mencakup upaya pencegahan melalui Edukasi Masyarakat melalui BINMAS Polri, dan mendukung kebijakan publik yang lebih kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Interpol Indonesia dan Interpol Kamboja telah mengambil langkah-langkah positif dalam memerangi kejahatan ini, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai solusi jangka panjang yang efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan kemajuan dalam upaya pemberantasan perdagangan organ tubuh manusia di Kamboja. Penelitian ini tidak hanya menyoroti peran penting Interpol Indonesia, tetapi juga

menyerukan perlunya kerja sama internasional yang lebih kuat dan pendekatan yang kuat untuk mengatasi masalah serius ini secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A R Saksono & I Made Tjatrayasa. "Fungsi Dan Peran International Criminal Police Organization-Interpol Dalam Ekstradisi".(2016). Diakses 21 Januari 2025.

Adellia, Vianda Sonia, Fuat Albayumi, and Bagus Sigit Sunarko. "Kerja Sama Transnasional Dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kamboja." *Journal of Social and Political Sciences (E- SOSPOL)* 9.2 (2022): 38–62. Print. Diakses 11 November 2024

Alya Natasya & Tulus Yuniasih. "NCB-Interpol Indonesia dalam Penanganan Permasalahan Narkotika Lintas Batas di Selat Malaka 2020 – 2022". Print. (2023). Diakses 11 Januari 2025.

Astuti Nur Fadillah & Abbas Mahmud . "Perdagangan Organ Tubuh Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Negara". Print. *BALOBELAW Journal* Vol. 3 No. 2 (2023). Diakses 21 Januari 2025.

DOI:10.47268/balobe.v3i2.1822

Bernadetha Aurelia Oktavira. "Jerat Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia". *hukumonline.com*. (2023). Diakses 21 Januari 2025.

Dea Sonya Septiani. "Peran Interpol Indonesia Dalam Membantu Interpol Italia Terkait Ekstradisi Mafia Antonino Messicati Vitale (2012-2013)". *Fisip UIN Jakarta*. (2014). Diakses 21 Januari 2025.

Dea Sonya Septiani. "Peran INTERPOL Indonesia Dalam Membantu INTERPOL Italia Terkait Ekstradisi Mafia Antonino Messicati Vitale (2012-2013)". Print. (2014). Diakses 10 Januari 2025.

Deri Wicaksono Surya. "Peran Hukum Internasional dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur". (2024). *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. Vol.2, No.2. DOI: <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.792>. Diakses 30 Januari 2025.

Detik. "Polisi Ungkap Sindikat TPPO Jual Beli Ginjal di Kamboja".(2023). Diakses 11 Januari 2025.

Dien Fahrur Romadhoni. "Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Ketidakadilan Kemanusiaan Dan Dampak Sosialnya". Print. Jurnal Ilmu Kepolisian (2023). Diakses 10 Januari 2025.

Felix Ferdin Bakker, Andhika Parama Putra, Respati Triana Putri. "Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia Tenggara (The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnational Crime in the Southeast Asia Region)". Vol 2, No.1. (2020). Diakses 21 Januari 2025.

Hasil wawancara dengan AKBP Januar Kencana S.I.K dan Briptu Mufti Rozaq S.H. pada 16 Januari 2025.

Interpol.int. "INTERPOL Issues Global Warning on Human Trafficking-Fueled Fraud." www.interpol.int. N.p., 7 June 2023. Print. Diakses 19 November 2024.

Kompas.com. "Beli Ginjal Rp 77 Juta, Jual Lagi Seharga Rp 531 Juta". (2017). Diakses 11 Januari 2025.

M Naseh, Ikhwanuddin, F Ramadhani, A Kusprabandaru, B Bathara. "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa". Jurnal Hubungan Internasional Vol. 8, No. 1. (2019). Diakses 21 Januari 2025.

Muh. Ardhan Arwin. "Peran Interpol Indonesia Di Wilayah Regional Asean". (2013). Diakses 30 Januari 2025.

Muhammad Daffa Fadhilah. "Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pencegahan Pelanggaran HAM Di JAMMU-KASHMIR Periode 2016-2020". (2022). Diakses 22 Januari 2025.

Mutiara Risdiyafani Ramadhan. "Upaya Ncb-Interpol Indonesia Dalam Penanganan Cybercrime: Business Email Compromise Tahun 2022". (2024). Diakses 30 Januari 2025.

News, Detik. "Polisi Ungkap Sindikat TPPO Jual Beli Ginjal Di Kamboja." Dw.com. Deutsche Welle. N.p., 2023. Print. Diakses 21 November 2024.

Pangalila, Fretes,& Seba.“Peran National Central Bureau (Ncb)-Interpol Indonesia Dalam Penanganan Cybercrime (Romance Scam) Tahun 2018-2021”. (2023). Print. Journal of International Studies, Volume 8, No. 1. Diakses 30 Januari 2025.

Perbatasan Indonesia”. Print.Journal of International Studies (2019). Diakses 10 Januari 2025.

Rendi Prayuda & Syafri Harto.“ ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika”. (2020). Diakses 22 Januari 2025.

Rendi Prayuda & Syafri Harto.“ ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika”. (2020). Diakses 22 Januari 2025.

Rendi Prayuda & Syafri Harto.“ ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika”. (2020). Diakses 30 Januari 2025.

Rosamalinda, Anggun et al. “Tinjauan Kriminologi Keimigrasian Terhadap Perdagangan Organ Lintas Negara Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia.” JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Volume 8 (2021):

n. pag. Diakses 22 November 2024. Web. <<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>>.

Ruslan, Abdul Gani, and Yudiarmansyah. “Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia.” Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ FENOMENA 8.2 (2016): n. pag. Print. Diakses 23 November 2024.

Ryzza Dharma.“ Peran International Criminal Police Organization pada penanganan kasus tindak pidana dalam perspektif hukum Internasional (Studi kasus: pencarian dan penangkapan M. Nazaruddin)”. (2012). Diakses 22 Januari 2025.

S A Fadhillah, M S Anastasia Matakupan, & B W Berlian Minggu .“ Peran Interpol dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest On Cybercrimes”. Journal on Education Volume 05, No. 04 (2023). Diakses 22 Januari 2025.

Sara Gabriella.“Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkotika Di Wilayah Perbatasan Indonesia”. Print.Journal of International Studies (2019). Diakses 30 Januari 2025.

Saragih, Aditama, & Siahaan. "Effectiveness of Mutual Legal Assistance Treaty in Investigating Indonesian Kidney Sale Crimes in Cambodia". (2024). *Jurnal Ius Constituendum*. Volume 9 Nomor 3. DOI: 10.26623/jic.v9i3.10240. Diakses 30 Januari 2025.

Selvi. "Ungkap Jaringan Sindikat Internasional TPPO Penjualan Ginjal, Bekasi Jadi Markas, Kamboja Jadi Tujuan". 2023. Print. Diakses 5 Januari 2025

Sonya Agustin. "Penjualan Organ Tubuh Manusia Melalui Transaksi Jual Beli Di Rumah Sakit Pemerintah (Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)". (2023). Diakses 21 Januari 2025.

T D Hardianti, Muhammad Rum, IMAS. "Efektivitas Rezim Interpol Dalam Menangani Kasus 'Kejahatan Internasional' Oleh Negara Anggota Represif Tahun 2012-2017 Melalui Sistem Red Notice". (2019). Diakses 21 Januari 2025.

Tarisya Alifia. "Kerjasama National Central Bureau (Ncb) Interpol Indonesia Dengan Pemerintah Kamboja Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia Yang Menimpa Warga Negara Indonesia Di Kamboja Tahun 2021 - 2022". (2023). Diakses 30 Januari 2025.